

KAJIAN PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN KOTA HIJAU DI BANDA ACEH

Syawwalina¹, Mirza Irwansyah², Eldina Fatimah³

¹⁾ Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3)} Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala

Abstract: *The fast growth of Banda Aceh implicates to the emergence of urban and environmental problems. That the concept of a green city or an environmentally friendly city has started to implement in Banda Aceh has encouraged me to conduct a research, which analysed to what extent the concept of a green planning has been implemented in Regional Spatial Plan (RTRW), identified the availability of existing green open space (RTH), and analysed the extent to which the participation of a green community in the development of Banda Aceh to be a green city. This research used a mixed methods, that qualitative data supported by quantitative data with a descriptive analysis, and the assessment used was a rating scale in order to determine the extent of community knowledge of the implementation a green city. To obtain a strategic step in its development, the analysis of SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) on the primary and secondary data was needed to be conducted. From this research, it is known that the community knowledge to the implementation of a green city in Banda Aceh has not been well; the concept of a green planning set in Regional Spatial Plan (RTRW) has not been run properly. Further, the availability of Green Open Space has not met the minimum standards that have been established, that is 30% of the area , as well as a community involvement and a green community in the development of the city were considered to be still less optimal. Therefore, the strategies resulted from SWOT analysis were produced for an effort to accelerate the development of a green city in Banda Aceh. The strategies resulted were: 1) to increase a socialisation to all elements of the urban community, 2) to improve the quality and quantity of Green Open Space, 3) to involve all parties in the planning, implementation and monitoring of the city development.*

Keywords : *Green city, green planning, green open space, green community.*

Abstrak: Pertumbuhan Kota Banda Aceh yang begitu cepat pasca tsunami berimplikasi terhadap timbulnya berbagai permasalahan perkotaan dan masalah lingkungan. Konsep kota hijau atau kota yang ramah lingkungan mulai diterapkan di Banda Aceh, sehingga mendorong dilakukannya analisis untuk melihat apakah Banda Aceh sudah layak dikategorikan sebagai kota hijau. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana konsep perencanaan dan perancangan ramah lingkungan (perencanaan hijau) telah diterapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mengidentifikasi ketersediaan RTH yang ada, dan menganalisis sejauh mana partisipasi komunitas hijau dalam pengembangan Banda Aceh menjadi kota hijau. Penelitian ini menggunakan kombinasi, dimana data kualitatif didukung dengan pengolahan data kuantitatif dengan analisis deskriptif, dengan penilaian menggunakan *rating scale* untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penerapan kota hijau. Untuk mendapatkan langkah strategis dalam pengembangannya dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) terhadap data primer dan sekunder. Dari penelitian ini diketahui bahwa pengetahuan masyarakat terhadap penerapan kota hijau di Banda Aceh kurang baik, konsep perencanaan hijau yang sudah tertuang dalam RTRW masih belum berjalan dengan semestinya, ketersediaan RTH belum memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan yaitu 30%, serta keterlibatan masyarakat dan komunitas hijau dalam pengembangan kota dirasakan masih kurang optimal. Sehingga dihasilkan strategi untuk upaya percepatan pengembangannya yang diperoleh dari analisis SWOT yaitu 1) Meningkatkan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat kota, 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH, 3) melibatkan semua pihak dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan kota.

Kata kunci : *Kota hijau, perencanaan hijau, ruang terbuka hijau, komunitas hijau.*

PENDAHULUAN

Pembangunan dan pengembangan Kota Banda Aceh secara cepat diberbagai sektor pasca tsunami mengakibatkan timbulnya permasalahan baru, seperti volume kendaraan yang semakin meningkat yang menyebabkan kemacetan, drainase yang tidak berfungsi dengan baik, masalah persampahan, persoalan penertiban pedagang kaki lima, dan berbagai persoalan kota lainnya. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan kota berkelanjutan yang menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat sebagai penghuni kota. Sehingga penerapan konsep kota hijau di Banda Aceh dirasakan sangat berperan terhadap perkembangan Banda Aceh menjadi sebuah kota yang ramah terhadap lingkungan.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah program kota hijau di Banda Aceh sudah berjalan cukup baik, apabila dinilai dari tiga elemen yang dijadikan tolak ukur yaitu perencanaan hijau, keterlibatan komunitas hijau, dan ketersediaan RTH dengan melihat kondisi eksisting Kota Banda Aceh saat ini.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kota Hijau

Kota hijau adalah kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (www.unep.org/wed).

Komponen dasar dari sebuah kota hijau adalah perencanaan hijau (*green planning*), ruang terbuka hijau (*green open space*), dan komunitas hijau (*green community*). Apabila tiga komponen dasar ini mampu diterapkan maka lima komponen berikutnya yang dikategorikan ke dalam *green infrastructure* yakni *green building*, *green energy*, *green water*, *green transportation* dan *green waste* akan dapat dikembangkan dengan baik (Kementerian Pekerjaan Umum, 2012).

Perencanaan Hijau

Perencanaan hijau merupakan sebuah konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berwawasan lingkungan dimaksudkan agar dalam proses pekerjaan produksinya senantiasa memperhatikan hak-hak ekosistem manusia, hewan maupun tumbuhan agar tetap lestari dan dapat hidup berdampingan. Adapun berkelanjutan diharapkan semua pemegang dan pemangku kepentingan turut menjaga keberlangsungan dan ketersediaan sumber daya alam yang ada secara terus menerus, baik sebagai sumber produksi maupun kelestarian lingkungan (Hajar, 2012).

Beberapa strategi terkait perencanaan hijau adalah :

- a. Menetapkan daerah yang tidak boleh dibangun.
- b. Menyusun kebijakan hijau.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

RTH kota pada dasarnya adalah bagian kota yang tidak terbangun, yang berfungsi

menunjang kenyamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian alam, dan umumnya terdiri dari ruang pergerakan linear atau koridor dan ruang pulau atau oasis (Spreigen, 1965 dalam Hakim, dkk, 2003).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 menetapkan tentang penyediaan RTH di kawasan perkotaan, yang dibedakan menjadi :

- a. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah, yaitu minimal 30% dari luas wilayah yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat
- b. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk. Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Penyediaan RTH berdasarkan fungsi tertentu.

Komunitas Hijau

Untuk mewujudkan kota hijau dalam rangka menghadapi perubahan iklim, diperlukan kerjasama dari masyarakat dan pemerintah, dimulai dari konsep perencanaan sampai aksi nyata bersama. Rencana aksi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan penerapan kota hijau adalah dukungan dan komitmen semua pihak dalam prosesnya, dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui

pentingnya aspek penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang nyaman, sehingga dapat mengatasi dan melakukan strategi penataan ruang yang terkait dalam adaptasi dan upaya mitigasi yang wajib dilakukan oleh semua komponen *stakeholder* terkait (Noviyanti, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, dimana Secara geografis berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT, yang terdiri dari 9 kecamatan, dan 90 gampong dengan luas wilayah keseluruhan ± 61,36 km².

Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada lingkungan wilayah Kota Banda Aceh, sedangkan batasan pembahasan dilakukan pada tiga elemen kota hijau yaitu perencanaan hijau, RTH dan komunitas hijau yang merupakan komponen dasar dalam pembentukan sebuah kota hijau sehingga nantinya didapatkan gambaran sejauh mana penerapan program kota hijau telah dilaksanakan di Banda Aceh.

Rancangan Penelitian

Metode yang dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif ini didukung oleh data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung, berupa data primer dan data sekunder.

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan utama, yaitu :

- Penentuan variabel dan indikator;
- Pengumpulan data primer dengan kuesioner, wawancara dan pengamatan langsung, dan pengumpulan data sekunder dari literatur yang ada;
- Pengolahan data primer dan sekunder untuk menentukan bobot terhadap penerapan konsep kota hijau yang sudah ada;
- Analisis data dengan metode kualitatif;
- Penyusunan strategi prioritas dengan analisis SWOT sebagai rencana tindak.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan inventarisasi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan berupa hasil wawancara dan kuesioner terkait dengan pengembangan kota hijau di Banda Aceh berupa perencanaan hijau, ketersediaan RTH di Kota Banda Aceh, serta keterlibatan masyarakat, komunitas hijau serta pihak swasta.

Hasil wawancara akan menjadi data untuk faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam penerapan dan pengembangan konsep kota hijau di Banda Aceh. Adapun pihak terkait yang dilibatkan adalah : (1) pejabat pemerintah, meliputi : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Aceh, Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh, Bappeda Kota Banda Aceh, Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh.

(2) Tenaga ahli bidang perencanaan kota, arsitektur/lansekap. (3) Komunitas Hijau, antara lain : Komite Perwujudan RTH Lembang, Forum Komunitas Peta Hijau Aceh, Forum Komunitas Hijau Hutan Kota BNI Tibang, dan Yayasan Bustanussalatin. (4) Pihak swasta : PT Bank Negara Indonesia, dan PT Buah Sejati.

Data primer lainnya bersumber dari kuesioner yang diajukan kepada masyarakat Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap perencanaan hijau, RTH, dan komunitas hijau. Sehingga nantinya diketahui sejauh mana pengembangan program kota hijau ini telah berjalan. Jumlah responden ditentukan berdasarkan rumus Slovin.

$$n = \frac{353.780}{1 + \frac{353.780}{3.538,80} \times (0.1)^2} = \frac{353.780}{3.538,80} = 99.972 \approx 100$$

Persamaan 1. Penentuan Sampel Penelitian dengan Menggunakan Rumus Slovin.

Analisis Data

Data primer hasil dari kuesioner akan diklasifikasikan dan dilakukan penilaian dengan menggunakan skala penilaian *rating scale*, yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berisi skala yang bertingkat yang dipilih oleh responden. Pada *rating scale* data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif, yaitu : 4 = sangat baik; 3 = cukup baik; 2 = kurang baik; 1 = sangat tidak baik. *Rating scale* ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat tentang konsep kota hijau telah

diterapkan dalam pengembangan Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui peran masing-masing *stakeholder*, khususnya komunitas hijau dalam penerapan dan pengembangan Banda Aceh sebagai kota hijau.

Analisis terhadap hasil pengolahan data dilakukan dalam bentuk analisis SWOT, dimana analisis ini merupakan alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan internal dan eksternal suatu objek. Analisis SWOT adalah mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil Data Primer

Data primer dari jawaban responden terhadap kuesioner terkait pengembangan kota hijau di Banda Aceh kemudian dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas.

Hasil Uji Validitas

Dari hasil perhitungan diperoleh 9 item pertanyaan dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi lebih tinggi dari 0,165.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

| No. | Pertanyaan | Corrected Item-Total Correlation | Syarat | r tabel (n=100) | Ket. |
|-----|---|----------------------------------|--------|-----------------|--------------|
| 1 | Penerapan kota hijau | 0.625 | > | 0.165 | valid |
| 2 | Tujuan pengembangan kota hijau | 0.462 | > | 0.165 | valid |
| 3 | Perencanaan hijau | 0.382 | > | 0.165 | valid |
| 4 | Teknik pengembangan kota hijau | 0.660 | > | 0.165 | valid |
| 5 | Kondisi eksisting RTH | 0.771 | > | 0.165 | valid |
| 6 | Pengembangan RTH | 0.575 | > | 0.165 | valid |
| 7 | Tanggung jawab pengelolaan/pemeliharaan RTH | 0.152 | < | 0.165 | *tidak valid |
| 8 | Keikutsertaan masyarakat, komunitas hijau, dan pihak swasta | 0.758 | > | 0.165 | valid |
| 9 | Fungsi dan peran masyarakat, komunitas hijau dan pihak swasta | 0.698 | > | 0.165 | valid |
| 10 | Kebijakan pemerintah | 0.708 | > | 0.165 | valid |

Sumber: Hasil Analisis 2014
Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas disimpulkan bahwa kuesioner untuk penelitian ini *reliable* dan

dapat diterima. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,600 yaitu 0,747.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

| Case Processing Summary | | | Reliability Statistics | |
|-------------------------|-----|-------|------------------------|------------|
| | N | % | Cronbach's Alpha | N of Items |
| Cases | | | | |
| Valid | 100 | 98.0 | .747 | 11 |
| Excluded ^a | 2 | 2.0 | | |
| Total | 102 | 100.0 | | |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber: Hasil Analisis 2014

Hasil Penilaian Masyarakat

Hasil data kuesioner yang diberikan kepada masyarakat warga Kota Banda Aceh sebagai responden dalam memberikan penilaian terhadap permasalahan mengenai sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penerapan kota hijau di Kota Banda Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. Dominasi Jawaban Responden

| No. | Pertanyaan | Nilai | | | | Total | Ket. |
|-----|--|-------|----|----|----|------------|------|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| | | % | % | % | % | % Terbesar | |
| 1 | Pemahaman Mengenai Penerapan Kota Hijau di Banda Aceh | 9 | 64 | 19 | 8 | 100 | 64 |
| 2 | Pemahaman Mengenai Maksud dan Tujuan Pengembangan Kota Hijau di Banda Aceh | 19 | 27 | 34 | 20 | 100 | 34 |
| 3 | Pemahaman Mengenai Perencanaan Hijau (Perencanaan yang Berkelanjutan) | 7 | 36 | 49 | 8 | 100 | 49 |
| 4 | Pemahaman Mengenai Teknik Pengembangan Kota Hijau | 36 | 28 | 25 | 11 | 100 | 36 |
| 5 | Pemahaman Mengenai RTH yang Ada di Kota Banda Aceh | 32 | 23 | 40 | 5 | 100 | 40 |
| 6 | Pemahaman Mengenai Pengembangan RTH Kota Banda Aceh | 11 | 21 | 54 | 14 | 100 | 54 |
| 7 | Pemahaman Mengenai Keikutsertaan Masyarakat, Komunitas Hijau, dan pihak swasta dalam pengembangan kota hijau | 6 | 1 | 34 | 59 | 100 | 59 |
| 8 | Pemahaman Mengenai Fungsi dan Peran Masyarakat, Komunitas Hijau, dan Pihak Swasta Dalam Pengembangan Banda Aceh Sebagai Kota Hijau | 24 | 20 | 24 | 32 | 100 | 32 |
| 9 | Pemahaman Mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pengembangan Kota Hijau | 9 | 24 | 32 | 35 | 100 | 35 |

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Hasil Wawancara *Expert Respondent*

Wawancara dilakukan kepada pejabat pemerintah pada instansi dan ahli diluar instansi pemerintah, yang dimaksudkan untuk menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi

permasalahan penerapan dan pengembangan kota hijau di Banda Aceh, serta sebagai masukan untuk strategi pengembangan Kota Banda Aceh menjadi sebuah kota yang ramah lingkungan. Hasil wawancara terhadap pejabat teknis dan pakar akan langsung dijelaskan pada perumusan manajemen strategi.

Pembahasan Data Sekunder

Analisis Terhadap Perencanaan Hijau

Prinsip kota hijau diarahkan pada pembangunan kawasan berkepadatan tinggi, *mixed used*, dan berorientasi pada manusia. Perancangan diarahkan untuk mengakomodasi lebih banyak ruang bagi pejalan kaki, penyandang cacat, dan pengguna sepeda. Untuk itu pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan dokumen perencanaan dan perancangan kota sebagai produk hukum yang kuat dan mengikat, baik dalam wujud peraturan daerah/ peraturan walikota, termasuk peraturan mengenai RTH, dalam hal ini mencakup juga pembuatan Master Plan Ruang Terbuka Hijau, Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang mengadopsi prinsip-prinsip kota hijau. Pemerintah Kota Banda Aceh telah melahirkan Qanun No.4 tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh tahun 2009-2029 yang turut mengatur tentang RTH Kota Banda Aceh.

Dalam RTRW Kota Banda Aceh tahun 2009-2029 konsep perencanaan kota hijau terlihat dari :

- Penetapan pola ruang kota didasarkan atas pertimbangan keadaan pola pemanfaatan ruang sebelum tsunami; kecenderungan

perkembangan yang terjadi pasca tsunami; optimasi dan efisiensi pemanfaatan ruang; kelestarian lingkungan; dan mitigasi terhadap bencana.

- Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota sangat memperhatikan pengembangan kawasan lindung dengan melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan kota dalam jangka panjang, penetapan kawasan perlindungan setempat, RTH, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, dan strategi pengembangan kawasan budidaya.
- Pelayanan transportasi kota 20 tahun yang akan datang lebih mengutamakan pelayanan dengan angkutan massal dan sistem pengangkutan sungai dengan memanfaatkan Krueng Aceh untuk transportasi umum, transportasi barang dan transportasi wisata.

Analisis Terhadap Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa RTH terdiri dari RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. Dalam RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 ditetapkan bahwa pengembangan RTH meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sabuk hijau, RTH pengaman sungai dan pantai atau RTH tepi air. Penyediaan RTH ini bertujuan untuk fungsi ekologis, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika yang tidak akan dikembangkan sebagai ruang terbangun.

Total luas RTH eksisting Kota Banda Aceh seluas 2.077,28 atau 33,85% dari luas

kota yang terdiri dari luas RTH publik eksisting sebesar 676,27 ha atau 11,02% artinya masih kekurangan 8,98% dari ketentuan luas minimal yang ditetapkan, dan sebaliknya ketersediaan RTH privat eksisting adalah sebesar 1.401,01 ha atau 22,83% telah melebihi luas minimal yang ditetapkan yaitu 10% dari luas wilayah. Namun distribusi RTH privat ini tidak merata dan sewaktu-waktu dapat berkurang karena pengalihan fungsi oleh masyarakat sebagai pemilik lahan.

Dalam perundangan dan peraturan pemerintah telah ditetapkan standarisasi dari luasan RTH sebuah kota. Berikut ini adalah standar RTH yang harus dimiliki Kota Banda Aceh berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan oksigen.

Tabel 4. Kebutuhan RTH Kota Banda Aceh Tahun 2029

| No | Kebutuhan RTH Kota | Luas RTH (ha) | % Terhadap Luas Kota | Keterangan |
|----|--|---------------|----------------------|--|
| 1 | Berdasarkan Persentase Luas Wilayah | 1.840,77 | 30,00 | Sesuai UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang |
| 2 | Berdasarkan Jumlah Penduduk | 404,79 | 6,59 | RTH Fasum (2,53m ² /jiwa) |
| 3 | Berdasarkan Kebutuhan Oksigen | 1.114,61 | 18,17 | $L = \frac{\sum a_i V_i + \sum b_i V_i + \sum c_i Z_i}{K}$ |
| 4 | Berdasarkan Kebutuhan Pohon Untuk Suplai Oksigen | 1.915,37 | 31,22 | 2 orang per pohon, 100 batang per ha |

Sumber : Master Plan RTH Kota Banda Aceh 2029 dan Hasil Analisis, 2014

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2029 Kota Banda Aceh harus memenuhi luasan RTH sebesar 1.840,77 ha (30%) jika dihitung dari luas wilayah kota, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk maka luas RTH yang harus tersedia adalah sebesar 404,79 ha (6,59%). Sedangkan apabila dinilai dari kebutuhan

oksigen untuk kota Banda Aceh maka luas RTH sebesar 1.114,61 ha (18,17%), dan luasan lahan yang harus disediakan untuk penanaman pohon sehingga dapat memenuhi suplai oksigen adalah sebesar 1.915,37 (31,11%).

Analisis Terhadap Komunitas Hijau

Sebahagian masyarakat Kota Banda Aceh sudah mempunyai kesadaran untuk membangun Kota Banda Aceh menjadi kota yang lebih baik. Hal ini terlihat dengan adanya komunitas-komunitas masyarakat yang telah terbentuk yang peduli terhadap lingkungan. Beberapa komunitas ini dibentuk oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya pengembangan program kota hijau, ada juga yang terbentuk sendiri oleh masyarakat namun jumlahnya masih sangat sedikit.

Komunitas yang terbentuk sendiri seperti Komunitas Peta Hijau yang telah memetakan RTH yang ada di Kota Banda Aceh. Komunitas ini sudah dilibatkan secara langsung oleh pemerintah kota untuk membantu percepatan pengembangan Banda Aceh menjadi kota hijau. Komunitas hijau yang dibentuk oleh pemerintah seperti komite perwujudan RTH Lambung. Komunitas ini bertugas membangun dan memelihara RTH di gampong Lambung.

Selain komunitas hijau, terdapat juga pihak swasta yang peduli terhadap pembangunan kota Banda Aceh diantaranya PT. Bank Negara Indonesia yang melakukan pengelolaan langsung hutan kota di Tibang, Kecamatan Syiah Kuala. Juga beberapa perusahaan swasta lainnya yang memberikan bibit tanaman secara langsung kepada

pemerintah. Keterlibatan pihak swasta ini tidak terlepas dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan pihak swasta bagi pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemilihan Manajemen Strategi Prioritas

Penentuan manajemen strategi untuk dilaksanakan ditentukan berdasarkan hasil analisis SWOT. Pada penelitian ini, penulis memberikan 3 (tiga) alternatif strategi berdasarkan analisis SWOT yang dapat dilaksanakan yaitu :

- a. Meningkatkan sosialisasi sampai pada tingkat desa mengenai RTRW, Rencana Detail Tata Ruang, Master plan RTH, dan peraturan-peraturan terkait kepada masyarakat dan pemilik gedung agar mereka memahaminya dan mudah dalam penerapan nantinya.
- b. Melakukan perawatan terhadap RTH yang ada guna peningkatan kualitas RTH kota Banda Aceh dan mewajibkan penyediaan lahan pembangunan RTH pada gedung kantor pemerintah dan swasta dan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan RTH untuk meningkatkan kuantitas RTH Kota Banda Aceh.
- c. Melibatkan semua pihak baik pemerintah, masyarakat, komunitas hijau, dan swasta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan kota untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota hijau.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat terhadap penerapan dan pengembangan kota hijau di Banda Aceh masih kurang baik. Masih ada sebahagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya konsep dan tujuan dari penerapan kota hijau, hal ini disebabkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, perancangan, dan pembangunan Kota Banda Aceh.
2. Prinsip perencanaan hijau pada Kota Banda Aceh telah diadopsi dengan baik dalam RTRW, juga dalam dokumen perencanaan untuk kawasan wisata Ulee Lheue, RTBL pusat kota baru dan Ulee Kareng, Banda Aceh *Water front City*, Rencana Aksi Kota Hijau 2013-2017, dan Masterplan RTH Kota Banda Aceh. Namun dalam penerapan masih belum berjalan dengan semestinya sehingga diperlukannya pengawasan yang lebih intensif oleh pihak terkait.
3. RTH Kota Banda Aceh belum memenuhi standar luas dan distribusi kebutuhan RTH. Dari 1.840,77 hektar luasan RTH yang terdiri dari 1.227,18 hektar RTH publik (20%) dan 613,59 hektar RTH privat (10%) yang harus dimiliki Kota Banda Aceh ternyata kondisi eksisting memperlihatkan bahwa luasan RTH yang dimiliki Kota Banda Aceh sebesar 676,27

hektar (11,02%) untuk RTH publik dan 1.401,00 (22,83%) untuk RTH privat. Artinya masih terdapat kekurangan sebesar 550,91 hektar (8,89%) untuk RTH publik Kota Banda Aceh.

4. Komunitas hijau yang ada di Kota Banda Aceh sudah bekerjasama dengan baik dengan pemerintah kota dalam pengembangan kota hijau di Banda Aceh.. Namun hal ini masih dirasakan kurang optimal ditambah lagi saat ini komunitas hijau yang telah terbentuk masih sedikit, sehingga perlunya usaha dari pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya peduli terhadap lingkungan hidup mereka.

SARAN

Dari penjelasan di atas maka saran dan masukan yang dapat diberikan antara lain:

1. Pentingnya suatu perencanaan yang komprehensif dalam merencanakan kota hijau dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.
2. Pemerintah Kota Banda Aceh perlu mengambil beberapa langkah dalam upaya memenuhi kebutuhan RTH, diantaranya melakukan pembebasan lahan untuk perluasan RTH publik, memanfaatkan lahan milik pemerintah yang tidak terpakai dialihfungsikan menjadi RTH, serta pemanfaatan secara maksimal halaman fasilitas publik menjadi taman kota. Selain itu dituntut ketegasan pemerintah dalam

penerapan ketentuan yang berlaku terkait penyediaan lahan hijau.

3. Pemerintah harus mengupayakan peningkatan peran masyarakat terhadap perencanaan, pembangunan, dan pengawasan pembangunan kota yaitu dengan terus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan intensif sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk membangun Kota Banda Aceh yang berkelanjutan.
4. Untuk dapat mengukur keberhasilan program yang telah berjalan dengan baik atau tidak, maka pemerintah sebaiknya melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hakim R, dkk, 2003, *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap – Prinsip, Unsur dan Aplikasi Desain*, Jakarta: Bumi Aksara
- Kementerian Pekerjaan Umum, 2012, *Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)*, Jakarta: Sekretariat P2KH
- Kiprah (Volume 52/Tahun XII/September-Oktober 2012) *Kota Hijau Sebuah Kebutuhan*, Jakarta; Kementerian Pekerjaan Umum.
- Noviyanti E, 2012, *Kota Hijau Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim (Empowerment For Green City)*, <http://www.green.kompasiana.com>.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2008, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

05/PRT/M/2008, tentang *Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang
Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.*

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No 26
tahun 2007, tentang *Perencanaan Tata
Ruang Wilayah Nasional.*

<http://www.unep.org>